ANALISI FAKTOR PENGHAMBAT PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PEMBERDAYAAN UMKM

Andi Nabila Bhayangkara Gunawan¹, Alya², Indo Tang³, Muh. Darul Ihsan⁴,
Kamaruddin Arsyad⁵
raihan.230420026@mhs.unimal.ac.id¹, alyabl321@gmail.com²,
indotang2705@gmail.com³, ihsanpatlas001@gmail.com⁴, dr.kamaruddin46@gmail.com⁵
Uin Alauddin Makassar

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektif akad musyarakah dalam memberikan dukungan terhadap pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode penelitian perpustakaan. Penelitian ini berfokus pada pengenalan kendala-kendala dalam penerapan akad musyarakah dan mengusulkan alternatif solusi yang dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan musyarakah memiliki potensi yang signifikan untuk memperkuat sektor UMKM, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya literasi mengenai syariah, ketidaksesuaian dalam menentukan nisbah, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM, serta lemahnya pengawasan dari lembaga keuangan yang berbasis syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara edukasi kepada pelaku UMKM dan peningkatan peran aktif lembaga keuangan syariah dalam mendampingi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad musyarakah. Diharapkan pendekatan ini dapat menciptakan pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Musyarakah, Pembiayaan Syariah, UMKM, Bagi Hasil, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan usaha mikro menempati porsi terbesar dan memiliki peran krusial dalam penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan. Dengan tingkat kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja (Suprayanto, 2024). Meskipun demikian UMKM kerap

kendala yang paling krusial dalam pondasi UMKM yaitu dari segi pembiayaannya.

Lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan UMKM dalam memfasilitasi pendanaan para pelaku UMKM. Hadir lembaga keuangan utamanya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pendanaan yang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional yang memiliki keterbatasan agunan.

Dalam lembaga keuangan syariah, menjadi tawaran solutif kepada UMKM dengan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, yang memberikan kemudahan permodalan bagi UMKM tanpa harus terikat akan bunga (riba) yang biasanya mereka dapat di perbankan konvensional ketika melakukan peminjaman dana (Wahyudin et al., 2022).

Dalam pemberian pembiayaan kepada UMKM lazimnya produk perbankan syariah yang digunakan adalah pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah. Salah satu akad yang biasa digunakan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi yaitu pada pembiayaan musyarakah dengan tingkat risiko lebih rendah hal ini sesuai dengan pembagian nisbah kepada nasabah lebih besar dengan angsuran perbulannya yang dibayarkan nasabah juga masih tergolong rendah (Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Namun, potensi besar dari pembiayaan Musyarakah ini belum tergarap maksimal karena rendahnya literasi masyarakat terhadap instrumen pembiayaan syariah secara umum. Dalam penelitian (Fathoni & Muzakki, 2024) nilai prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi ekonomi syariah ini tidak sesuai yang diharapkan oleh nasabah dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap implementasi akad musyarakah. Sehingga kurangnya pemahaman terhadap pembiayaan musyarakah ini dalam penelitian yang dilakukan (Ulfa & Iflahah, 2022) menemukan perilaku nasabah yang tidak peduli akan konteks akad yang diterapkan pada akad musyarakah, sehingga norma-norma hukum syariah pembiayaan terabaikan akibat kurangnya pemahaman nasabah.

Tak hanya pemahaman nasabah tetapi juga masih kurangnya optimalisasi prinsip syariah dan pelaksanaan secara idealitas pada dasarnya tidak diterapkan begitu maksimal. Hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan (Ulfa & Iflahah, 2022) pada BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso dalam penerapan akad musyarakah, dalam penentuan tidak sesuai dengan mekanisme musyarakah seharusnya pembagian nisbah dilakukan dengan musyawarah bersama sehingga pembagian nisbah dilakukan secara transparan antara kedua belah pihak. Sama halnya dalam penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Tasikmalaya dimana pelaksanaan pembiayaan musyarakahnya terdapat ketidaksesuaian antara implementasi di lapangan dan prinsip syariah yang ideal karena masih kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan di penelitian yang dilakukan oleh (Firdausi, Iqbal; Ardiarta, Naylwa; Mu'is, 2023) dalam pola kerjanya seutuhnya dipegang penuh oleh anggota dan pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara hanya memantau usaha, padahal dalam pembiayaan ini para pihak harus berbagi porsi kerja, begitu pula dalam pembagian kerugian diperuntukkan hanya pihak anggota, namun seharusnya dalam pembiayaan musyarakah kedua pihak harus membagi kerugian.

Adapun gap research pada penelitian ini yang akan saya uraikan dengan penelitian terdahulu yaitu perlunya elaborasi terhadap permasalahan yang mempengaruhi efektivitas akad musyarakah secara holistik dan penawaran solutif terhadap permasalahan yang ada. Sehingga dalam mengoptimalkan penerapan pembiayaan musyarakah bagi pelaku UMKM diperlukan pemahaman literasi serta pemahaman aspek syariah terhadap akad musyarakah. Tak hanya pemahaman nasabah yang perlu ditingkatkan, tetapi pengawasan dan pemahaman pelaku operasional juga perlu diperhatikan agar optimalisasi akad musyarakah dapat memenuhi idealitas akad musyarakah yang seharusnya dan mengoptimalkan UMKM sebagai pondasi pertumbuhan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan) untuk menggali dan menganalisis permasalahan yang mempengaruhi efektivitas kontrak musyarakah dan menganalisis Solusi alternatif dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada UMKM ketika melakukan pembiayaan

adalah narrative review. Untuk membangun kerangka pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap tema penelitian, dengan mengintegrasikan berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang diolah dalam studi ini sepenuhnya merupakan data sekunder, yang bersumber dari publikasi akademik, seperti website resmi kementerian keuangan, jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional, artikel kajian kontemporer, serta laporan resmi oleh Lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan UMKM

Pembiayaan musyarakah di Indonesia, yang merupakan bagian dari perbankan syariah, memiliki peran penting dalam penyaluran dana. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan musyarakah mencapai 48.93% dari total pembiayaan pada Desember 2023. Selain itu, pembiayaan musyarakah juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan sebesar 28,65% pada akhir tahun 2022, di mana total dana yang dibiayai mencapai Rp 90.701.000.000 (Widodo, Rudy, Dolly, T.A, A, 2024)

Tabel 1. Penyaluran Dana Pembiayaan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Jenis Pembiayaan	2022 (Miliar Rp)	2023 (Miliar Rp)	2024 (Miliar Rp)
Pembiayaan Mudharabah	10.376	12.252	16.295
Pembiayaan Musyarakah	223. 680	275.930	315.878

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Berdasarkan data diatas potensi pembiayaan musyarakah lebih banyak dikeluarkan oleh perbankan dibandingkan pembiayaan mudharabah. Sehingga pembiayaan musyarakah ini salah satu pilih pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan sumber modal dilembaga keuangan syariah.

Pembiayaan memiliki peran penting dalam perkembangan UMKM, terutama dengan menitikberatkan pada sektor-sektor produktif dan kelompok masyarakat yang lebih luas. Untuk itu, pengembangan produk pembiayaan diformulasikan sedemikian penyalurannya lebih terarah dan tepat guna.

B. Permasalahan Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah, dengan prinsip bagi hasil dan risiko bersama, sejatinya menawarkan potensi besar sebagai solusi pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan konvensional, musyarakah diharapkan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Namun, implementasinya tidak selalu mulus. Berbagai hambatan seringkali muncul di lapangan, menghambat optimalisasi peran musyarakah dalam memberdayakan UMKM. Hambatan-hambatan ini perlu diidentifikasi dan dipahami secara mendalam agar solusi yang tepat dapat dirumuskan.

a. Kesulitan dalam pembagian keuntungan dan kerugian

Salah satu hambatan utama dalam implementasi pembiayaan musyarakah untuk UMKM adalah kompleksitas dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Meskipun prinsip bagi hasil ini menjadi inti dari musyarakah, praktiknya seringkali menghadapi tantangan signifikan. Pertama, penentuan keuntungan dan kerugian yang transparan dan akuntabel bukanlah perkara mudah bagi UMKM. Banyak UMKM, khususnya yang berskala mikro dan kecil, belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi dan terstandarisasi. Hal ini menyulitkan identifikasi secara jelas mana yang merupakan keuntungan operasional dan mana yang bukan, serta bagaimana menghitung besaran kerugian yang mungkin timbul. Akibatnya, ada potensi salah perhitungan atau bahkan manipulasi yang bisa merugikan salah satu pihak, baik UMKM maupun lembaga keuangan syariah.

Kedua, metode pembagian keuntungan yang adil dan disepakati bersama juga seringkali menjadi perdebatan. Apakah pembagiannya berdasarkan persentase modal yang disetor, persentase kontribusi kerja, atau kombinasi keduanya. Masing-masing metode memiliki implikasi yang berbeda dan harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap UMKM dan jenis usahanya. Kurangnya kesepahaman di awal atau perubahan kondisi usaha di tengah jalan dapat memicu sengketa. seringkali dihindari dalam pembiayaan konvensional, namun menjadi bagian intrinsik dari musyarakah. Dalam praktiknya, ketika UMKM mengalami kerugian, lembaga keuangan syariah juga harus menanggung porsi kerugian tersebut sesuai kesepakatan. Namun, tidak semua lembaga keuangan syariah memiliki kapasitas atau kesiapan untuk secara aktif mengelola risiko kerugian ini bersama UMKM. Di sisi lain, UMKM sendiri mungkin belum sepenuhnya memahami implikasi pembagian kerugian ini, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa tidak adil jika kerugian terjadi.

Tabel 2. Penyaluran Dana Pembiayaan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Jenis Penggunaan UMKM	2022 (Miliar Rp)	2023 (Miliar Rp)	2024 (Miliar Rp)
Modal Kerja	47 036	46 562	44 996
Investasi	40 104	48 848	58 931

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Kesulitan-kesulitan ini secara langsung memengaruhi minat lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan musyarakah kepada UMKM, serta pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan UMKM terhadap skema pembiayaan ini. Hal ini terbukti dengan angka pemberian modal dalam penyaluran dana pembiayaan di tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 4,74%, dan penurunan yang sangat signifikan ditahun 2023 sebesar 15,66% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyederhanakan proses, meningkatkan edukasi, dan membangun sistem yang mendukung transparansi dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Permasalahan penetapan keuntungan dan kerugian ini diperlukan pendampingan bank syariah bersama UMKM untuk memantau secara langsung manajerial keuangan UMKM hal ini secara tidak langsung dapat memantau akuntabilitas dan transparansi dalam menghitung keuntungan dan kerugian yang terjadi pada UMKM. Hasil Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan menjadi landasan utama dalam penyusunan kesepakatan keuntungan atau kerugian sehingga keterlibatan langsung bank syariah memberikan pengaruh kerugian.

b. Implementasi praktik

1) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Meskipun pembiayaan musyarakah adalah produk syariah, memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah dalam setiap tahapan transaksi bisa jadi rumit. UMKM, yang sebagian besar belum memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah, mungkin kesulitan memahami implikasi syariah dari setiap klausul perjanjian. Misalnya, pemahaman tentang bagi hasil yang murni (profit-and-loss sharing) versus praktik mark-up atau margin yang menyerupai bunga konvensional seringkali membingungkan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah pun harus memastikan bahwa operasional mereka, mulai dari akad hingga eksekusi proyek, benar-benar bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Proses due diligence syariah yang ketat dan pemantauan berkelanjutan diperlukan, namun seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga keuangan syariah, terutama yang

berskala kecil atau menengah. Jika kepatuhan syariah ini tidak terjaga, keabsahan dan keberkahan transaksi akan dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan baik dari UMKM maupun masyarakat.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek transparansi dan akuntabilitas adalah jantung dari musyarakah. Tanpa keduanya, prinsip bagi hasil akan sulit diwujudkan secara adil. Namun, dalam konteks UMKM, pencapaian transparansi dan akuntabilitas seringkali terhambat. Banyak UMKM masih mengelola keuangan secara sederhana, bahkan terkadang mencampuradukkan keuangan pribadi dan usaha. Ini menyulitkan lembaga keuangan syariah untuk memverifikasi laporan keuangan, melacak penggunaan dana, dan memantau kinerja proyek secara real-time.

Ketiadaan data keuangan yang akurat dan terverifikasi menghambat lembaga keuangan syariah dalam membuat keputusan pembiayaan yang tepat dan melakukan pengawasan yang efektif. Ini juga memicu kecurigaan dan banyak diintervensi, sementara lembaga keuangan syariah merasa sulit mengawasi investasinya. Akibatnya, risiko moral hazard meningkat dan tujuan bagi hasil yang adil menjadi sulit dicapai.

3) Dokumentasi dan pencatatan

Terakhir, dokumentasi dan pencatatan yang lengkap menjadi fondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas, namun seringkali menjadi titik lemah bagi UMKM. Banyak UMKM belum memiliki sistem pencatatan transaksi yang sistematis, baik itu penerimaan, pengeluaran, persediaan, maupun aset. Hal ini tidak hanya menyulitkan UMKM sendiri dalam mengelola usahanya, tetapi juga menyulitkan lembaga keuangan syariah dalam melakukan verifikasi dan pelaporan.

Kesalahan atau ketidaklengkapan dalam dokumentasi dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama terkait perhitungan bagi hasil atau penentuan kerugian. Keterbatasan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang standar, seperti laporan laba rugi atau neraca, memaksa lembaga keuangan syariah untuk melakukan upaya ekstra dalam verifikasi data, atau bahkan mengurungkan niat untuk memberikan pembiayaan karena tingkat risiko yang tidak terukur.

KESIMPULAN

Sebagai salah satu alat keuangan syariah yang memiliki potensi besar untuk memajukan dan memberdayakan UMKM di Indonesia, pembiayaan musyarakah memberikan keuntungan melalui mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko yang adil. Meskipun demikian, penerapan metode ini masih menghadapi berbagai tantangan penting, seperti rendahnya pemahaman tentang syariah, kurangnya transparansi, serta keterbatasan dalam sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan. Oleh karena itu, untuk memastikan pembiayaan musyarakah dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung sektor produktif, dibutuhkan upaya terintegrasi, termasuk peningkatan literasi dan pemahaman tentang syariah, penguatan pengawasan, serta pengembangan sistem pencatatan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan analisis yang terdapat dalam artikel ini, disarankan agar optimalisasi pembiayaan musyarakah untuk pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan pengertian mekanisme akad dan pembagian keuntungan serta kerugian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat peran mereka dalam mendampingi dan mengawasi secara aktif, memastikan bahwa proses penetapan nisbah dilakukan dengan cara musyawarah dan transparan, serta mendorong pencatatan keuangan yang tertib di kalangan UMKM. Sinergi antara edukasi dan

penguatan pengawasan diharapkan dapat menciptakan pembiayaan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memaksimalkan potensi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, M. N. (2023). Strategi pembiayaan perbankan syariah dalam mendukung keuangan inklusif bagi sektor mikro: Studi kasus PT. BPRS Gebu Prima Medan. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 18–32. <https://doi.org/10.59636/saujana.v5i02.142>
- Alimatul Farida. (2020). Analisis pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. *Malia*, 11(2), 327–340. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2150>
- Fathoni, A. I., & Muzakki, A. (2024). Kontroversi akad musyarakah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah di Bank Syariah Indonesia: Analisis ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 147–164.
- Firdausi, I., Ardiarta, N., & Mu'is, A. (2023). Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah. [Makalah], 1–10.
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi dalam kontrak bisnis syariah serta penyelesaian sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>
- Nethania, C., & Nisa, F. L. (2024). HARE: Sharia Economic Review, 1(1), 12–19.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik perbankan syariah. <https://www.ojk.go.id>
- Rahayu, R. (2021). [Artikel dalam] *Jurnal Keislaman*, 2, 176–185.
- Suprayanto, B. E. (2024). Mendorong pertumbuhan ekonomi lewat KUR dan insentif UMKM. Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu RI. <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-pembendaharaan/4990-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>
- Ulfa, M., & Ifflah, N. (2022). Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon di BMT UGT Sidogiri Cabang Ranuyoso Kabupaten Lumajang. *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1(2), 143–155. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.629>
- Wahyudin, M., Susianti, N., & [Penulis lainnya]. (2022). Peranan pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro dan menengah (Studi kasus BSI KCP Pati tahun 2022). *Al-Iqtishadiyah: Journal of Islamic Economics*, 2(Desember), 34–44. <https://ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/aliqtishadiyah/article/view/216>
- Widodo, R., Dolly, T. A., & A., J. A. K. M. (2024). Pembiayaan musyarakah. Otoritas Jasa Keuangan. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>.